



Sulit Akses Bantuan Hukum

YOGYA, TRIBUN- Kalangan legislatif tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait bantuan hukum. Pasalnya, saat ini DPRD Kota Yogya prihatin banyak warga miskin yang tidak bisa mengakses bantuan hukum dan belum melek hukum.

"Banyak masyarakat utamanya warga miskin dan rentan miskin yang masih awam atau tidak melek hukum. Hal ini dipengaruhi ketidakmampuan finansial," kata anggota Komisi A DPRD

Kota Yogya, Bambang Anjar Jalumurti, kemarin.

Dia menjelaskan, persoalan seperti ini juga masih luput dari perhatian pemerintah di daerah. Untuk itu, pihaknya mengusulkan raperda tersebut untuk memfasilitasi warga miskin maupun rentan miskin bisa mengakses bantuan hukum. Regulasi ini pun ditargetkan masuk pembahasan tahun ini.

"Regulasi terkait bantuan hukum dinilai mendasak untuk direalisasikan," jelas politisi PKS ini.

● ke halaman 14



Banyak masyarakat utamanya warga miskin dan rentan miskin yang masih awam atau tidak melek hukum. Hal ini dipengaruhi ketidakmampuan finansial

Sulit Akses Bantuan Hukum

● Sambungan Hal 13

Dalam aturan ini nantinya Pemkot dituntut untuk membuat program peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat. Program itu sekaligus menjadi jaminan kepastian keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam mengakses bantuan hukum.

Anggaran

Selain itu, dalam aturan ada amanat untuk mengalo-

kasikan anggaran. Menurutnya, meski di pengadilan sebenarnya sudah ada alokasi anggaran untuk membantu warga miskin dalam mengakses bantuan hukum. Namun, ternyata masih ada warga kurang mampu yang belum mampu mengaksesnya.

Dia menilai, aturan ini perlu direalisasikan, meski pengadilan sudah memiliki kebijakan untuk mengakomodasi warga miskin maupun rentan miskin. Menurutnya, dengan Pemkot mengalokasikan anggaran bantu-

an hukum, tidak terjadi tumpang tindih kebijakan pengadilan.

"Justru akan saling mendukung karena dibatasi oleh aturan," ulasnya.

Meski demikian, pihak Komisi A mengaku masih akan melakukan kajian lebih mendalam dengan pihak ketiga. Terutama untuk mengerucutkan daftar isian masalah sekaligus langkah awal penyusunan naskah akademik. Ditargetkan, pada triwulan keempat sudah dapat dibahas secara intensif. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005